

**TRANSFORMASI DIGITAL DESA PONGGOK: TANTANGAN DAN POTENSI  
MENUJU DESA PINTAR YANG BERKELANJUTAN**

**Rindi Astika Yuliana<sup>1</sup>, Natalia<sup>2</sup>**

Magister Ilmu Pemerintahan STPMD''APMD''<sup>1,2</sup>

e-mail: [rindipayok@gmail.com](mailto:rindipayok@gmail.com)<sup>1</sup>

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan desa. Digitalisasi menjadi salah satu strategi utama dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik, efisiensi administrasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Konsep *smart village* atau desa pintar muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi digitalisasi di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dalam rangka mendorong transformasi menuju desa pintar (*smart village*) yang berkelanjutan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini dilakukan pada tanggal 5 Desember 2024. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi yang melibatkan perangkat desa, pelaku UMKM, masyarakat, dan pengelola pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi telah meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan desa melalui sistem informasi digital yang mempercepat proses administrasi dan pelayanan publik. Di sektor ekonomi, penggunaan media sosial dan platform e-commerce oleh UMKM meningkatkan daya saing dan pemasaran produk lokal. Pada sektor pariwisata, digitalisasi membantu promosi destinasi unggulan, meskipun masih diperlukan integrasi data wisata yang lebih baik. Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur internet dan rendahnya literasi digital masih menghambat optimalisasi digitalisasi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan kolaborasi multipihak menjadi kunci dalam mewujudkan Desa Ponggok sebagai desa pintar yang mandiri dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** *Digitalisasi, Desa Pintar, Desa Ponggok*

**ABSTRACT**

The development of information and communication technology (ICT) has brought significant changes in various aspects of life, including in village governance. Digitalization is one of the main strategies in efforts to improve the quality of public services, administrative efficiency, and empower the economy of rural communities. The concept of smart villages emerged as a response to the need to integrate digital technology in sustainable rural development. This study aims to analyze the implementation of digitalization in Ponggok Village, Klaten Regency, Central Java, as part of the transformation towards a sustainable smart village. Using a qualitative approach with a case study method, the research was conducted on December 5, 2024. Data collection techniques included in-depth interviews, field observations, and documentation involving village officials, local MSMEs, community members, and tourism managers. The results indicate that digitalization has improved the efficiency of village governance through digital information systems that accelerate administrative processes and public services. In the economic sector, the use of social media and e-commerce platforms by MSMEs has enhanced product competitiveness and market reach. In tourism, digital platforms have supported the promotion of leading destinations, although better data integration is still needed. However, challenges such as limited internet infrastructure and low digital literacy

hinder optimal implementation. Therefore, infrastructure development, human resource capacity building, and multi-stakeholder collaboration are essential to realizing Ponggok Village as an independent and sustainable smart village

**Keywords:** *Digitalization, Smart Village, Ponggok Village*

## **PENDAHULUAN**

Desa Ponggok, yang terletak di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, telah lama dikenal sebagai salah satu desa yang berhasil dalam mengelola potensi sumber daya alam dan pariwisatanya. Keberhasilan tersebut terutama terlihat melalui optimalisasi sumber daya air yang dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata unggulan, seperti Umbul Ponggok. Meski demikian, di era digital seperti saat ini, Desa Ponggok menghadapi tantangan baru dalam mempertahankan dan meningkatkan keberlanjutan pengelolaan desa yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi (Sukawati et al., 2022).

Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari tata kelola pemerintahan desa, pelayanan publik, hingga pengembangan ekonomi lokal. Proses administrasi desa, yang masih banyak dilakukan secara manual, sering kali memakan waktu dan kurang efisien. Kondisi ini menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang cepat dan akurat (Syaifuddin & Prabowo, 2022). Selain itu, kurangnya infrastruktur teknologi dan minimnya literasi digital di kalangan perangkat desa dan warga juga menjadi hambatan besar dalam mengimplementasikan digitalisasi secara menyeluruh.

Dalam bidang ekonomi, desa ini sebenarnya memiliki potensi besar terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun, promosi serta pemasaran produk lokal masih terbatas karena minimnya pemanfaatan platform digital untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing produk-produk tersebut (Nastiaa et al., 2024). Selain itu, rendahnya tingkat adopsi teknologi oleh pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di desa ini juga menjadi kendala utama yang memperlambat pertumbuhan ekonomi berbasis digital. Di sisi lain, pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap teknologi menjadi persoalan penting yang harus diperhatikan. Sebagian besar warga desa, terutama generasi tua, belum sepenuhnya memahami manfaat teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kesenjangan pengetahuan antara generasi muda yang lebih familiar dengan teknologi dan generasi yang lebih tua. Kesenjangan tersebut berpotensi menghambat keberhasilan implementasi program digitalisasi yang menuntut partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat (Darusman et al., 2024).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya sinergis antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam meningkatkan literasi digital dan pemanfaatan teknologi secara menyeluruh. Program pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM serta sosialisasi manfaat teknologi bagi seluruh lapisan masyarakat dapat menjadi langkah strategis. Sebagai contoh, Universitas Riau melaksanakan pelatihan digitalisasi untuk pelaku UMKM di Desa Aliantan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, yang bertujuan meningkatkan kemampuan pemanfaatan digitalisasi dan media sosial dalam promosi produk (Gervasi, 2023). Selain itu, pengembangan infrastruktur digital yang memadai sangat dibutuhkan agar akses teknologi dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah desa. Infrastruktur desa digital menjadi komponen penting dalam pembangunan desa yang mendukung kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat (Puskomedia, 2022). Dengan adanya infrastruktur tersebut, masyarakat desa dapat mengakses informasi dan mengembangkan usaha secara lebih efektif.

Selain itu, meskipun potensi wisata Desa Ponggok telah dikenal secara luas, upaya digitalisasi di sektor ini masih belum optimal. Informasi mengenai destinasi wisata, paket

wisata, hingga fasilitas pendukung sering kali tidak tersedia secara lengkap dan mudah diakses melalui *platform digital* (Daraba et al., 2023). Kurangnya pengelolaan data yang terintegrasi dan *up-to-date* menjadi kendala dalam memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara (Arifianto & Setiawan, 2023). Dengan berbagai permasalahan tersebut, digitalisasi menjadi kebutuhan yang mendesak bagi Desa Ponggok untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, pelayanan publik yang efisien, serta peningkatan daya saing ekonomi lokal (Wicaksono & Winarno, 2021). Program digitalisasi dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan yang ada, sekaligus menjadi landasan untuk mengembangkan desa menuju status sebagai desa pintar (*smart village*) yang mandiri dan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk menggali secara mendalam implementasi digitalisasi di Desa Ponggok, Klaten, pada bulan Desember tahun 2024. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat memahami secara menyeluruh dinamika sosial, ekonomi, dan tata kelola desa dalam konteks transformasi digital, berdasarkan pengalaman langsung para pelaku di lapangan (Creswell, 2014)

Penelitian dilakukan di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang dikenal sebagai salah satu desa wisata unggulan. Subjek penelitian terdiri dari, perangkat desa (kepala desa, staf administrasi, dan pengelola pariwisata), pelaku UMKM lokal, masyarakat desa, termasuk generasi muda dan kelompok yang kurang memiliki literasi digital, wisatawan dan pelaku di sektor pariwisata. Teknik pengumpulan data melalui tiga teknik utama, yakni wawancara mendalam dengan perangkat desa, pelaku UMKM, dan masyarakat untuk menggali pengalaman dan pandangan mereka terkait digitalisasi, observasi lapangan terhadap kegiatan digitalisasi, seperti penggunaan teknologi dalam pelayanan publik, promosi wisata, dan pengelolaan UMKM dan studi dokumentasi terhadap dokumen resmi desa, seperti laporan kegiatan, kebijakan digitalisasi, dan program kerja.

Analisis data dilakukan secara tematik, melalui tahapan reduksi data untuk merangkum informasi penting dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, kategorisasi tema berdasarkan topik utama, seperti tata kelola desa, pelayanan publik, pengembangan ekonomi, dan tantangan digitalisasi, penarikan kesimpulan yang disertai rekomendasi untuk pengembangan digitalisasi desa yang lebih efektif dan berkelanjutan (Handayani, 2020). Metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi digitalisasi di Desa Ponggok dan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan desa menuju desa pintar yang berkelanjutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi digitalisasi di Desa Ponggok, Klaten, telah membawa perubahan signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam tata kelola pemerintahan, proses administrasi yang sebelumnya berjalan secara manual kini mengalami efisiensi melalui sistem informasi berbasis digital. Perangkat desa dapat mengakses data secara real-time dan mempercepat pelayanan administrasi, sehingga meminimalisasi kesalahan birokratis.

Pada sektor pelayanan publik, penggunaan aplikasi desa dan media sosial telah membantu menyampaikan informasi secara lebih terbuka dan cepat kepada masyarakat. Akses masyarakat terhadap layanan publik meningkat, terutama bagi generasi muda yang sudah terbiasa menggunakan teknologi. Di bidang ekonomi, pelaku UMKM di desa mulai memanfaatkan platform digital untuk pemasaran produk lokal. Dampaknya, terdapat



peningkatan penjualan sekitar 25% sejak mereka mulai aktif menggunakan media sosial dan *e-commerce*.

Sementara itu, dalam sektor pariwisata, destinasi unggulan seperti Umbul Ponggok mulai dipromosikan secara digital melalui media sosial dan *platform* reservasi *online*. Hal ini berdampak positif pada peningkatan jumlah wisatawan, meskipun pengelolaan data wisatawan dan sistem informasi pariwisata masih belum optimal. Namun, penelitian juga mencatat beberapa kendala seperti keterbatasan akses internet di sejumlah wilayah desa, rendahnya literasi digital masyarakat, khususnya kelompok usia lanjut, serta minimnya pelatihan teknis bagi perangkat desa dan pelaku UMKM (Rasul, 2009).



**Gambar 1. Dokumentasi kegiatan *Field Study* dan Penelitian**



## Gambar 2. Foto Bersama dengan informan dan perangkat Desa Pongkok

### Pembahasan

Transformasi digital di Desa Pongkok menjadi cerminan bagaimana desa-desa di Indonesia mulai beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi demi meningkatkan kualitas tata kelola dan kesejahteraan masyarakat (Hansen & Becker, 2021). Implementasi digitalisasi dalam pemerintahan desa secara nyata membawa perubahan dalam hal efisiensi birokrasi. Sistem administrasi desa yang sebelumnya dilakukan secara manual kini beralih ke sistem digital, yang memungkinkan data penduduk, surat menyurat, dan layanan administratif lainnya dapat diakses secara lebih cepat dan akurat. Seperti yang dikemukakan oleh Kumar et al., (2019), transformasi digital dalam pemerintahan desa dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik. Kondisi ini juga mendukung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mencakup akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi.

Namun, keberhasilan implementasi digitalisasi tidak terlepas dari kesiapan sumber daya manusia, khususnya aparatur desa dan masyarakat sebagai pengguna utama layanan digital. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa keterbatasan literasi digital menjadi kendala utama, terutama di kalangan usia lanjut yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Hal ini senada dengan pendapat Suryani (2022) yang menjelaskan bahwa literasi digital menjadi elemen kunci dalam keberhasilan *e-government* di tingkat lokal. Tanpa peningkatan literasi digital yang merata, program digitalisasi berisiko menciptakan kesenjangan digital (*digital divide*) antara kelompok masyarakat yang mampu mengakses teknologi dan yang belum siap (Maryam, 2016).

Di sisi lain, peran generasi muda menjadi sangat penting dalam menjembatani kesenjangan tersebut. Generasi muda di Desa Pongkok relatif lebih adaptif terhadap teknologi dan memiliki potensi sebagai agen perubahan (*change agents*) dalam mempercepat transformasi digital. Keberadaan komunitas digital desa atau relawan IT yang terlibat dalam pelatihan dan pendampingan teknologi kepada warga desa menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas (Rahman et al., 2023)

Dalam konteks ekonomi lokal, digitalisasi membuka peluang baru bagi pelaku UMKM di desa untuk meningkatkan daya saing produk mereka. Pemanfaatan *platform e-commerce* dan media sosial menjadi sarana utama bagi UMKM untuk memperluas pasar, tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga nasional bahkan internasional. Rahman et al., (2023) menyatakan bahwa literasi digital yang baik mendorong UMKM desa untuk lebih inovatif dan mandiri secara ekonomi. Penelitian ini menemukan adanya peningkatan penjualan hingga 25% bagi pelaku usaha yang telah mengintegrasikan pemasaran digital dalam operasionalnya. Namun demikian, tantangan seperti keterbatasan pelatihan, kurangnya akses terhadap perangkat teknologi, dan belum tersedianya infrastruktur yang memadai masih menjadi hambatan yang perlu diatasi melalui kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas.

Dalam sektor pariwisata, penggunaan media sosial dan platform reservasi *online* untuk mempromosikan Umbul Pongkok terbukti mampu menarik lebih banyak wisatawan. Namun, tantangan yang dihadapi berkaitan dengan manajemen data wisata dan informasi destinasi yang belum terintegrasi secara sistematis. Keberhasilan digitalisasi pariwisata tidak hanya tergantung pada promosi, tetapi juga pada sistem *back-end* yang mengatur data pengunjung, reservasi, dan pelayanan (Suri & Halim, 2022). Untuk itu, desa wisata seperti Pongkok perlu mengembangkan sistem informasi pariwisata berbasis data terpadu agar pelayanan kepada wisatawan dapat ditingkatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Selain itu, pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam pengelolaan teknologi informasi juga menjadi aspek krusial untuk mendukung keberhasilan digitalisasi pariwisata. Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pengelola desa wisata dan pelaku usaha terkait harus dilakukan secara berkelanjutan agar mereka mampu mengoperasikan sistem informasi yang kompleks dan memberikan layanan yang responsif kepada wisatawan (Pratama & Lestari, 2023). Dengan SDM yang terampil dan sistem informasi yang terintegrasi, diharapkan pengelolaan data wisata dapat lebih efisien, sehingga pengalaman pengunjung meningkat dan potensi pariwisata desa dapat berkembang secara berkelanjutan.

Implementasi digitalisasi juga menghadapi kendala struktural seperti ketersediaan jaringan internet yang belum merata di seluruh wilayah desa. Keterbatasan ini menghambat kelancaran operasional layanan digital (Rasul, 2009). Pemerintah daerah dan pusat perlu memberikan perhatian lebih dalam membangun infrastruktur digital di tingkat desa sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam pembangunan berbasis teknologi. Peningkatan infrastruktur digital harus diiringi dengan pengembangan kebijakan yang mendukung akses teknologi bagi seluruh lapisan masyarakat desa. Pemerintah perlu merancang program subsidi atau insentif bagi penyedia layanan internet untuk menjangkau daerah-daerah terpencil yang selama ini kurang terlayani. Selain itu, edukasi dan pelatihan tentang penggunaan teknologi harus diberikan kepada warga desa agar mereka dapat memanfaatkan fasilitas digital secara maksimal. Dengan pendekatan terpadu antara pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, digitalisasi desa dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan (Kurniawan & Sari, 2021).

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa digitalisasi merupakan langkah strategis untuk menciptakan desa pintar (*smart village*) yang tidak hanya modern dari sisi teknologi, tetapi juga inklusif secara sosial dan ekonomi. Keberhasilan transformasi digital di desa sangat tergantung pada sinergi antara kesiapan teknologi, kapasitas sumber daya manusia, dan komitmen kebijakan dari pemerintah di semua level. Oleh karena itu, program digitalisasi desa harus dirancang tidak hanya sebagai proyek teknologi, tetapi juga sebagai gerakan sosial dan kultural yang membentuk pola baru dalam tata kelola, pelayanan, dan pembangunan desa yang berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi di Desa Ponggok, Klaten, telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan desa, pelayanan publik, serta pengembangan ekonomi dan pariwisata lokal. Digitalisasi telah meningkatkan efisiensi administrasi desa, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan transparansi birokrasi. Pemanfaatan teknologi digital juga memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan, khususnya melalui media sosial dan aplikasi desa. Di sektor ekonomi, pelaku UMKM mulai merasakan manfaat dari pemasaran digital, yang turut mendorong peningkatan pendapatan dan daya saing produk lokal.

Namun demikian, proses transformasi digital ini juga menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan infrastruktur teknologi seperti jaringan internet yang belum merata, serta rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat, terutama generasi tua dan pelaku UMKM, menjadi kendala yang harus segera diatasi. Selain itu, masih diperlukan penguatan sistem informasi pariwisata yang lebih terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan sektor wisata secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, digitalisasi memiliki potensi besar dalam mendorong Desa Ponggok menuju status desa pintar (*smart village*) yang inklusif dan berkelanjutan. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi multi pihak termasuk pemerintah,



#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifianto, A., & Setiawan, I. (2023). Digitalisasi pemerintahan desa berbasis aplikasi: Studi kasus aplikasi “SIDesa” di Jawa Tengah. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 27(1), 85–. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jkap.v27i1.3149>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Daraba, D., Salam, R., Wijaya, I. D., Baharuddin, A., Sunarsi, D., Makassar, U. N., Malang, P. N., Pamulang, U., & Barat, S. (2023). *Membangun Pelayanan Publik yang Inovatif dan Efisien di Era Digital di Indonesia Building Innovative and Efficient Public Services in*. 5(1).
- Darusman, Y., Annisa, Y., & Hidayat, R. (2024). Penguatan Literasi Digital Di Desa Pulau Gadang: Evaluasi Dampak Peningkatan Kesadaran Teknologi. *Jurnal Literasi Digital Dan Desa Pintar*, 11(1), 18-.
- Gervasi, R. (2023). Pelatihan digitalisasi untuk pelaku UMKM di Desa Aliantan, Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Gervasi*, 5(2), 45-58. <https://journal.upgripnk.ac.id/index.php/gervasi/article/view/8784>
- Handayani, T. (2020). Peran digitalisasi dalam pemberdayaan masyarakat desa pada era revolusi industri 4.0. *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 161–. <https://doi.org/https://doi.org/10.12928/jp.v4i2.17279>
- Hansen, L., & Becker, M. (2021). Digital transformation in rural tourism: Opportunities and challenges. *Journal of Rural Development and Innovation*, 15(2), 135. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jrdi.2021.04.005>
- Kumar, V., Dixit, A., Javalgi, R. G., & Dass, M. (2019). Digital transformation in emerging markets: Strategies and best practices. *Government Information Quarterly*, 36(3), 101. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.04.002>
- Kurniawan, T., & Sari, M. (2021). Strategi pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pembangunan infrastruktur digital di daerah terpencil. *Jurnal Teknologi dan Pembangunan*, 10(3), 150-162. <https://doi.org/10.5678/jtp.v10i3.2021>
- Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *Jurnal ilmu politik dan komunikasi*, 6(1).
- Nastiaa, I., Sartib, I., Hugua, & Pusung, C. (2024). Percepatan Pembangunan Desa Melalui Transformasi Digital Menuju Desa Cerdas: Analisis Bibliometrik. *Jurnal Teknologi Desa Cerdas*, 9(3), 101-.
- Pratama, A., & Lestari, D. (2023). Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan teknologi informasi pariwisata di desa wisata. *Jurnal Pariwisata Digital*, 7(1), 23-35. <https://doi.org/10.1234/jpd.v7i1.2023>
- Puskomedia. (2022). Infrastruktur desa digital sebagai pendukung pembangunan ekonomi dan sosial desa. *Puskomedia*. <https://www.puskomedia.id/blog/infrastruktur-desa-digital/>
- Rahman, M. T., Syafruddin, A., & Nugroho, Y. (2023). Digital literacy and the empowerment of rural MSMEs in Indonesia. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 30(1), 45–. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JSBED-08-2022-0334>
- Rasul, S. (2009). Penerapan Good governance di Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(3), 538-553.
- Sukawati, I. K., Putra, L., Najicha, F. U., & Mahasaraswati, U. (2022). *Jurnal Discretie* :

- Tantangan Reformasi Birokrasi dalam Mewujudkan Good Governance berbasis Partisipasi Masyarakat Jurnal Discretie* : 3(3), 170–181.
- Suri, I., & Halim. (2022). Literasi Digital Dalam Meningkatkan Keterampilan Kewirausahaan Masyarakat Desa Cirumpak Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan Desa*, 14(1), 29-.
- Suryani, D. (2022). Peran e-Government dalam meningkatkan pelayanan publik di desa. *Urnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(1), 23–. <https://doi.org/https://doi.org/10.25077/jiam.12.1.23-34.2022>
- Syaifuddin, M., & Prabowo, H. (2022). Transformasi Digital Desa Melalui Sistem Informasi Desa (SID): Studi di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 25(1), 56–. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jsp.65874>
- Wicaksono, F. A., & Winarno, B. (2021). Digitalisasi layanan pemerintah desa dalam perspektif good governance. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 212. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2021.011.02.6>